

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mengelola sumber daya (input), seperti bahan baku dan tenaga kerja yang diproses untuk menghasilkan barang dan jasa (output) bagi pelanggan. Kegiatan produksi atau pengelolaan ini tentu memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang akan menggerakkan perusahaan tersebut. Keuntungan ini dapat berupa peningkatan kesejahteraan pada pemegang saham atau pun komponen lain yang ikut andil dalam perusahaan tersebut.

Pemenuhan keuntungan tersebut merupakan dampak dari kinerja perusahaan di mana keuntungan ini juga dapat disebabkan dari timbal balik lingkungan yang memadai serta komunitas disekitar produksi perusahaan.

Fungsi keuntungan tersebut merupakan biaya operasional perusahaan, untuk menyiapkan perusahaan di masa depan dan sebagai premi atas resiko yang ditempuh oleh perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnisnya, dimana bisnis adalah sebuah tindakan yang penuh resiko karena menatap masa depan yang penuh ketidakpastian, tanpa profit, perusahaan tidak akan dapat beroperasi - bahkan tidak akan mungkin eksis di masa depan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ali Soegiharto. [http://www.kompasiana.com/1jari/tujuan-perusahaan-bisnis-bukan-keuntungan\\_55d31aac4423bd560c9501d9](http://www.kompasiana.com/1jari/tujuan-perusahaan-bisnis-bukan-keuntungan_55d31aac4423bd560c9501d9). Diakses tanggal 2 Maret 2016. Pukul 17.44

Keuntungan inilah yang harus dipersiapkan oleh perusahaan, di mana keuntungan itu harus lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.

Para manajer dan direktur CSR di Indonesia menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa CSR bukanlah sekadar biaya, melainkan adalah investasi yang menguntungkan pemangku kepentingan dan perusahaan<sup>2</sup>. Ketika CSR dianggap sebagai sekadar biaya, sangat sulit untuk mendapatkan sokongan yang layak dari lapisan teratas dalam manajemen. Anggapan bahwa CSR adalah sekadar biaya juga masih sangat tampak, terutama ketika perusahaan sedang mengalami kinerja finansial yang memburuk.

Ditambah lagi keberadaan tanggung jawab perusahaan sering kali terdapat penyimpangan dimana penyimpangan tersebut dapat berupa pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak tepat atau tidak terdapat transparansi atas dana yang di keluarkan perusahaan untuk ikut berkontribusi pada mestinya.

“Pengelolaan dana sumbangan pihak ketiga untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dinilai telah melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung. Dana dari pihak swasta yang bersifat hibah seharusnya diberitahukan ke DPRD. Bahkan, dana Corporate Social Responsibility (CSR) seharusnya tidak dikelola oleh pemkot, namun dana itu diberikan perusahaan langsung ke warga sekitar. Selain itu, selama dua tahun ini, pengelolaan CSR dan hibah dari pihak ketiga pengelolaannya dituding tak transparan dan akuntabel. DPRD Kota Bandung pun sama sekali belum pernah

---

<sup>2</sup> A+ CSR Indonesia. <http://csrindonesia.com/tantangan-peluang-perkembangan-csr-indonesia/>. Diakses tanggal 6 Maret 2016. Pukul 16.53

menerima laporan soal berapa banyak CSR dan hibah yang sudah diterima Pemkot Bandung, baik itu tahun 2014 maupun 2015<sup>3</sup>”.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk dari kontribusi perusahaan terhadap segmen lingkungan dimasyarakat, namun tidak sedikit perusahaan yang memanfaatkan tanggung jawab perusahaan ini sebagai pendorong citra perusahaan untuk lebih berkembang, seperti sebuah kamufase pemanfaatan tanggung jawab tersebut. Kalangan aktivis rokok mengungkapkan kegiatan *corporate Social responsibility (CSR)* industri rokok hanyalah kamufase perusahaan.

"Kalau mau melakukan CSR bikin kegiatan yang bisa menutupi dampak kerugian lingkungan, keuntungan sebuah perusahaan rokok pada beberapa tahun lalu mencapai Rp10 triliun, sementara anggaran untuk kegiatan CSR-nya hanya mencapai Rp60 miliar. Hal tersebut, dinilai tidak seimbang antara keuntungan dengan upaya menutupi dampak kerugian lingkungan, belum lagi, lanjutnya, dampak kesehatan dan jiwa akibat rokok. Selain itu, perusahaan Djarum dengan bakti sosial di luar kegiatan budaya salah satunya menanam sekitar 84.000 pohon. Hal tersebut dinilai sangat kurang jika melihat industri besar seperti Djarum. Menurutnya, contoh kerusakan alam cukup besar akibat industri tembakau terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat yang mencapai 1,4 hektare hingga 1,6 hektare per tahun. Belum lagi di kawasan khusus tanaman tembakau di wilayah Jawa. Jadi coba kalau mau bikin CSR lakukan sesuatu yang seimbang<sup>4</sup>.”

Beberapa perusahaan tentu bergerak di bidang atau sektor yang mengelola atau memanfaatkan sumber daya lingkungan, pemanfaat itu tentu akan berdampak pada lingkungan seperti limbah yang dihasilkan, ataupun dampak lingkungan yang mulai terasa seperti polusi. Perusahaan

---

<sup>3</sup> Yedi Supriadi, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-roya/2015/12/09/353081/pengelolaan-csr-pemkot-bandung-diduga-melanggar-hukum>. Diakses tanggal 02 April 2016. Pukul 22.00

<sup>4</sup> Saeno, <http://industri.bisnis.com/read/20160323/257/530730/aktivis-pengendalian-tembakau-csr-perusahaan-rokok-hanya-kamufase>, Diakses tanggal 30 Maret 2016. Pukul 16.53

harus mampu memberikan tanggung jawab untuk memperbaiki ataupun membuat lebih dari yang sebelumnya. Namun masih terdapat perusahaan yang tak sadar tanggung jawab yang telah diberikan tidak tepat guna untuk masyarakat.

“Penyaluran corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta untuk Kabupaten Pamekasan masih dinilai belum tepat pada sasaran. Terdapat masalah sosial yang potensial dibantu dan CSR yang tidak mampu diselesaikan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan. program CSR di Pamekasan saat ini belum sinergis dengan kondisi riil di Pamekasan. Yakni pemberian kebutuhan yang sebenarnya sangat mampu disediakan APBD, seperti penyediaan bak sampah, tandon air atau pemberian mobil ambulans untuk puskesmas atau rumah sakit tertentu, Sehingga, penyaluran CSR dari perusahaan, masih sebatas inisiatif murni dari perusahaan tanpa komunikasi lebih mendalam dengan pemkab, utamanya soal kebutuhan sosial yang mendesak bagi masyarakat. Dicontohkan, dalam pelayanan BPJS untuk warga miskin, belum mengkafer seluruh warga miskin. Kendati sudah dibantu dari APBD sebesar Rp5 miliar pada tahun 2016, tetap belum mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan warga miskin. Pelayanan itu diklaimkan saat warga miskin menjalani pengobatan dan tindakan medis di rumah sakit<sup>5</sup>”.

Sumber daya finansial untuk ber-CSR biasanya sangat berkurang.

Dana CSR menjadi yang pertama dikorbankan ketika krisis sedang terjadi, seakan-akan bahwa hubungan baik dengan pemangku kepentingan tidaklah perlu dipertahankan. Tantangan bagi mereka yang mengelola CSR adalah membuktikan bahwa menjalankan CSR memang menguntungkan perusahaan. Dari sisi manajemen risiko, perlu dibuktikan bahwa risiko misalnya demonstrasi oleh masyarakat atau pekerja memang menurun ketika sumberdaya ditingkatkan.

---

<sup>5</sup> Umar. <http://korankabar.com/sasaran-csr-perusahaan-belum-sinergis/Diakses> tanggal 1 April 2016. Pukul 22.00

CSR juga harus dibuktikan membawa peluang-peluang bisnis bagi perusahaan, misalnya penghematan operasional, inovasi produk baru, atau terbukanya pasar baru. Namun hal ini tentu saja, harus dibuktikan dengan tingkat presisi yang tinggi, dengan mengukur perbedaan antara sebelum dan sesudah inisiatif CSR tertentu dilaksanakan. Untuk itu, para pengelola CSR harus memiliki data dasar dan disiplin pengukuran yang tinggi.

“Hadirnya kepemilikan saham berupa institusi dapat pula menjadi penentu dalam sebuah kebijakan terkait dengan CSR, hal ini di karenakan hal milik oleh kelembagaan atau badan tersebut menjadi penggerak dalam perkembangan sosial terhadap masyarakat, dengan hadirnya mereka dalam masyarakat tentu berpengaruh dalam citra perusahaan tersebut, sehingga dapat diartikan CSR ini akan tergantung pada komposisi kepemilikan dalam organisasi perusahaan tersebut<sup>6</sup>”.

Kehadiran CSR atau Tanggung Jawab Sosial tersebut telah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan<sup>7</sup>. Namun belum terdapat standar pasti atau biaya serta bidang yang harus disesuaikan dalam tanggung jawab sosial perusahaan tersebut untuk mengungkapkan.

Laporan mengenai lingkungan hidup merupakan tambahan dalam laporan keuangan sehingga timbul suka rela dalam pengungkapan seperti

---

<sup>6</sup> A+ CSR Indonesia. <http://csrindonesia.com/tantangan-peluang-perkembangan-csr-indonesia/>. Diakses tanggal 6 Maret 2016. Pukul 16.53

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan terbatas.

[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_perundangan&id=3673&task=detail&catid=3&Itemid=42&ahun=2012](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=3673&task=detail&catid=3&Itemid=42&ahun=2012). Diakses Tanggal 6 Maret 2016. Pukul 20.47

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009)

Paragraf kedua belas.

Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan<sup>8</sup>.

Tanggung jawab Sosial tersebut merupakan kewajiban perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Sehingga keberadaan perusahaan akan berkaitan dengan keberadaan masyarakat. CSR bukan lagi menjadi bagian tanggung jawab namun sudah menjadi kewajiban<sup>9</sup>.

Kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada perusahaan merupakan peran korporasi atas apa yang telah didapat oleh perusahaan sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Meski program pengentasan masyarakat miskin selama ini masih saja dijejali oleh program-program yang bersifat karitatif (santunan), tanpa ada upaya memberdayakan<sup>10</sup>.

Timbal balik inilah yang harus diperhatikan untuk keberlanjutan perusahaan. Sehingga, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kepada keadaan semula atau bahkan berkembang kearah yang lebih baik.

---

<sup>8</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009) Paragraf kedua belas

<sup>9</sup> Budi. <http://ugm.ac.id/id/berita/8967-meski.diatur.uu.csr.bukan.keterpaksaan>. Diakses Tanggal 6 Maret 2016. Pukul 20.52

<sup>10</sup> *Ibid.*

Namun tidak dapat dipungkiri keberadaan CSR masih menjadi wacana yang menimbulkan polemik penyimpangan dana untuk masyarakat. Bahwa program yang didanai dari dana CSR itu memang bermasalah<sup>11</sup>. Dimana perusahaan dan masyarakat serta instansi terkait sangat membutuhkan sehingga hal tersebut merupakan wacana yang harus dihapuskan dengan prinsip berbagi perusahaan yang tidak menghitung untung rugi.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap dampak dari semua kegiatan perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan disekitar produksi perusahaan, namun tanggung jawab ini terus berkembang dimana, tanggung jawab sosial tidak hanya di sekitar area produksi tetapi lebih luas yaitu berkontribusi meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di negara Indonesia ini. Menteri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dimana “Program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) diharapkan dapat menjadi mesin pendorong bagi kesejahteraan masyarakat luas<sup>12</sup>”.

Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ini beragam dari pendidikan hingga perbaikan alam. Program CSR itu nantinya digunakan untuk lingkungan, pendidikan, kesehatan dan program sosial lainnya di

---

<sup>11</sup> Wianda Puspongoro <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/02/078697026/pertamina-beri-isyarat-program-csr-nya-bermasalah>. Diakses Tanggal 12 Maret 2016. Pukul 21.26

<sup>12</sup> Yanuar Riezqi Yovanda. <http://ekbis.sindonews.com/read/1089346/34/menkop-ukm-csr-harus-dorong-kesejahteraan-masyarakat-1456763929>. Diakses tanggal 6 Maret 2016 pukul 16.26

masyarakat<sup>13</sup>. Tantangan berikutnya datang dari perusahaan sendiri, khususnya dari mereka yang bertanggung jawab atas komunikasi perusahaan. CSR washing atau penunggang CSR untuk kepentingan pengelabuan citra banyak dilakukan, agar dengan segera perusahaan mendapatkan citra yang baik<sup>14</sup>, banyak perusahaan di Indonesia yang menonjolkan aktivitas sosial tertentu.

Hal ini menyembunyikan fakta bahwa untuk mengambil baja, perusahaan biasanya melakukan land clearing hutan, dan proses produksinya memakan energi dalam jumlah yang besar, jauh melampaui apa yang disubstitusinya. Terkadang, sangat jelas pula bahwa dana komunikasi terutama advertorial yang digelontorkan jumlahnya melebihi sumberdaya yang dicurahkan untuk membiayai kegiatannya. Hal ini sesungguhnya sangat bertentangan dengan apa yang hendak dituju dalam CSR.

“Kelompok-kelompok masyarakat yang memandang CSR sekadar sebagai donasi. Mereka memiliki ekspektasi yang sangat tinggi atas “dana CSR” perusahaan, terutama di tempat-tempat di mana pemerintah pusat dan daerah gagal menjangkau mereka. Hal ini disebabkan kecenderungan aparat pemerintah untuk membiarkan pembangunan desa atau kecamatan di mana terdapat perusahaan dilakukan oleh perusahaan itu. Anggaran pembangunan di tempat perusahaan berada biasanya dikecilkan, dengan dalih bahwa di situ sudah banyak “dana CSR” yang diberikan. Masyarakat kemudian belajar bahwa pemerintah ternyata tidak bisa diandalkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan yang mereka inginkan, dan perusahaan menjadi satu-satunya alternatif. Dalam kondisi demikian, yang kemudian berkembang adalah hubungan yang tidak sehat di antara perusahaan dan masyarakat, di mana masyarakat

---

<sup>13</sup> Tri dan Yun. <http://fokusjabar.com/2016/02/24/perusahaan-bandung-barat-tak-terbuka-soal-csr/>. Diakses Tanggal 12 Maret 2016. Pukul 22.05

<sup>14</sup> A+ CSR Indonesia. <http://csrindonesia.com/tantangan-peluang-perkembangan-csr-indonesia/>. Diakses tanggal 12 Maret 2016. Pukul 21.33



memandang perusahaan harus sepenuhnya bertanggung jawab penuh atas pembangunan di wilayah mereka, Perusahaan menjadi setengah pemerintah. Masyarakat juga mudah marah ketika perusahaan tidak memenuhi harapan mereka yang sangat tinggi<sup>15</sup>”.

Dengan beban berat seperti itu, perusahaan kesulitan mengembangkan bentuk-bentuk CSR yang semakin strategik, karena terjebak dalam kubangan donasi, yang harus mereka berikan untuk membeli keamanan operasi perusahaan dari masyarakat setempat, terutama kaum elitnya.

Program ini yang diusung perusahaan ketika memasuki dunia bisnis dan melakukan kegiatan, sehingga usia perusahaan mampu mendorong perusahaan melakukan tanggung jawab sosial, karena tanggung jawab sosial merupakan bagian dari kontribusi keuntungan dan lingkungan, lamanya perusahaan beroperasi tentu memberi dampak pada lingkungan, serta timbulnya masalah baru untuk berkontribusi kepada masyarakat, namun terdapat pula perusahaan dengan usia yang cukup tidak lagi memikirkan dampak dari lingkungan atau tidak berkontribusi, hal ini karena tentu keuntungan yang ingin di capai<sup>16</sup>. Banyaknya program CSR sering menjadikan program yang diusung justru tak tepat sasaran. Di tahun 2015, isu besar mengenai program CSR telah diprediksi berdasarkan penelitian CSR Asia. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli CSR di kawasan Asia tersebut: perubahan iklim dan air, tata kelola perusahaan, keterbukaan, dan anti-korupsi, investasi komunitas dan pembangunan

---

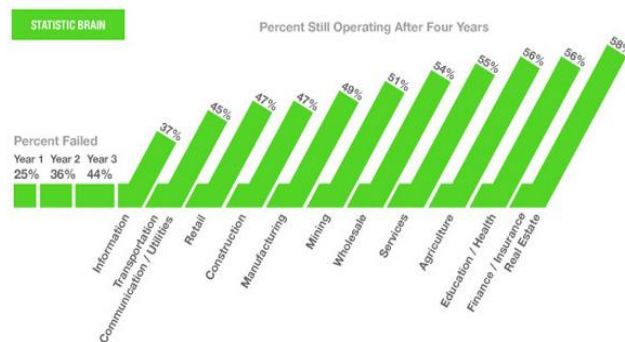
<sup>15</sup> Pandu. <http://csrindonesia.com/tantangan-peluang-perkembangan-csr-indonesia/>. Diakses tanggal 12 Maret 2016. Pukul 21.33

<sup>16</sup> Admin. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18664/csr-kegiatan-sukarela-yang-wajib-diatur>. Diakses Tanggal 14 Maret 2016. Pukul 23.00

jangka panjang, hak asasi manusia dan perdagangan manusia, kesenjangan dan ketimpangan sosial<sup>17</sup>.

Berdasarkan survey dari Statistic Brain yang dilakukan oleh Entrepreneur Weekly, Small Business Development Center, Bradley Univ dan University of Tennessee Research di tahun 2015, jumlah perusahaan startup atau perusahaan yang baru berdiri dan melewati tahun pertama operasional hanya berjumlah 75% atau sebesar 25% mengalami kebangkrutan. Pada tahun kedua yang dapat bertahan menjadi sebesar 64% dan pada tahun ketiga yang dapat bertahan hanya sebesar 56%<sup>18</sup>.

**Gambar I. 1**  
**Usia pertahanan perusahaan**



Sumber: Statistic Brain

Dilihat dari Gambar I.1 dapat dijelaskan bahwa umur perusahaan yang dapat bertahan hingga 3 tahun sebanyak 56% artinya 44 % perusahaan dalam waktu 3 tahun mengalami kebangkrutan, untuk tahun setelah masa penyesuaian 3 tahun perusahaan yang bergerak dalam sektor konstruksi sebesar 47 % dapat beroperasi di dunia bisnis sedangkan perusahaan real estate sebesar 58% yang beroperasi. Hal ini tentu cukup besar untuk perusahaan yang dapat bertahan hingga lebih dari 3 tahun.

<sup>17</sup> SEA <http://csr-indonesia.com/2015/02/lima-isu-paling-menarik-untuk-program-csr-2015/>. Diakses Tanggal 17 Maret 2016. Pukul 22.23

<sup>18</sup> <http://www.ciputra-uceo.net/blog/2015/5/12/umur-perusahaan-definisi-dan-analisa-selama-4-tahun.> Diakses tanggal 25 Maret 2016. Pukul 23.00

**Tabel I. 1**  
**Perkembangan Perdagangan Saham Sektoral Tahun 2015**

Sektoral	Rata - Rata Tahun 2015			Kapitalisasi Pasar	
	Volume (juta)	Nilai (Rp Juta)	Freq (kali)	Nilai (Rp)	%
IHSG	5,889.99	5,765.84	222.15	4,796,803,823,046,190	100.00
Pertanian	419.55	305.89	15.60	108,322,959,176,750	2.26
Pertambangan	668.59	291.92	18.85	157,705,066,215,281	3.29
Industri Dasar	784.43	419.01	17.97	288,179,265,623,335	6.01
Aneka Industri	309.44	384.01	14.56	302,189,549,235,477	6.30
Industri Konsumsi	105.21	493.71	18.21	1,126,157,015,385,890	23.48
Properti & Real Estate	1,370.29	871.19	42.03	369,852,393,360,770	7.71
Infrastruktur	673.72	663.31	27.18	638,839,234,013,289	13.32
Keuangan	598.53	1,373.08	29.66	1,206,377,478,177,920	25.15
Perdagangan	960.22	963.72	38.10	599,180,861,857,480	12.49

Sumber : OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 2015

Pada tabel I.1 terlihat perkembangan perdagangan saham pada berbagai sektoral pada tahun 2015, untuk sektor properti dan real estate rata-rata tahun 2015 volume 1.370,29 (juta) dengan nilai 871,19 (juta) yang mengalami transaksi atau freq 42,03 % cukup tinggi di dibandingkan dengan sektor yang lain dalam tahun 2015 meski kapasitas pasarnya hanya 7 %.

**Tabel I. 2**  
**Komposisi Saham**

Grand Total		2,596
		Asing
		Local
Komposisi share asing : lokal		64%
		36%
<b>Asing</b>		
investor institusi		1,645
Individu		11
<b>Local</b>		
investor institusi		780
Individu		160

Sumber: OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 2015

Komposisi asing jelas mendominasi value dari kepemilikan saham dari sisi kepemilikan ekuitas asing menguasai 64% dari total Value di BEI dan di dominasi oleh investor institusi. Hal ini tentu menggambarkan komposisi yang cukup besar didominasi oleh kepemilikan institusi yang tersebar diberbagai sector dengan jumlah saham yang beragam. Kepemilikan saham ini digambarkan lebih dominan oleh Asing hal ini karena investor telah sadar akan kondisi ekonomi Indonesia yang cukup berkembang. Sedangkan pihak domestik atau dalam negeri belum

begitu signifikan terhadap pembeli saham dalam negeri hal ini di mungkinkan karena kurangnya edukasi terhadap permasalahan investasi berupa saham. Berikut tabel komposisi saham secara terperinci:

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai berikut:

1. Sebagai biaya tambahan perusahaan,
2. Adanya kamuflasa terkait citra perusahaan,
3. Kurangnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi lokal,
4. Kurangnya peran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat,
5. Penyimpangan dana program,
6. Mengejar keuntungan seiring bertambahnya usia perusahaan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Setelah mengidentifikasi berbagai masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti membatasi masalah-masalah yang akan diteliti pada pengaruh umur perusahaan dan kepemilikan institusional perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Umur perusahaan sebagai variabel independen dapat diukur dengan tahun berdiri dikurang dengan tahun penelitian, Kepemilikan Institusional sebagai variable independen diukur dengan persentase jumlah saham institusi dibanding jumlah saham yang beredar, sedangkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai variabel dependen dapat diukur dengan perentase jumlah

item yang diungkap dibagi dengan total sebanyak 80 item pada pada indikator *GRI G4*.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah terdapat umur perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan atau?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi yakni sebagai referensi baik teoritis maupun empiris kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam penentuan kebijakan perusahaan untuk menentukan tanggung jawab sosial yang harus dihadapi demi keberlanjutan perusahaan tersebut.